



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUNING PURWANTI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA & UMUM**
3. NHK : **211095**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.039.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/180 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 505.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/93 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
3. Tanah Seluas 915 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 19.000.000
4. Tanah Seluas 239 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 119.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 105.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 51.558.194****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.209.663.194****III. HUTANG****Rp. 73.024.330****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.136.638.864**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.